

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis yang semakin pesat telah memunculkan persaingan yang ketat diantara entitas bisnis yang ada. Dalam persaingan yang semakin ketat tersebut, suatu perusahaan harus mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan harus mampu menarik investor dan kreditur agar tetap mempercayakan investasinya kepada perusahaan. Kinerja manajemen perusahaan yang baik menjadi suatu tuntutan investor yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Peran laporan keuangan menjadi sangat penting sebagai alat ukur yang digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan. Kinerja manajemen perusahaan tercermin pada laba yang terkandung dalam laporan keuangan.

Laba merupakan ukuran paling sederhana untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Informasi tentang laba (*earnings*) mempunyai peran sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal, laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus kepada manajer, ukuran prestasi atau kinerja manajemen dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak sehingga pihak manajemen melakukan penekanan dan membuat beban pajak sekecil mungkin untuk meminimalkan pembayaran pajak. Oleh karena itu, kualitas laba menjadi pusat perhatian bagi

investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi, dan pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak.

Dalam rangka pembangunan dan dalam usahanya untuk mensejahterakan rakyatnya, Negara memerlukan peran serta yang aktif dalam seluruh elemen masyarakat. Wujud menunaikan kewajibannya setelah memperoleh haknya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini adalah mempengaruhi kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia dengan cara membayar pajak setelah terlebih dulu dikukuhkan sebagai Wajib Pajak

Pajak merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi penerimaan Negara dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diinformasikan melalui *website* resminya Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 250 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,4 triliun, dimana presentase tertinggi di peroleh dari penerimaan pajak yaitu mencapai hingga 85,6% dari pendapatan negara. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (pasal 1 angka 1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat

memaksakan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak selaku warga Negara kepada Negara sebagai suatu perwujudan keikutsertaan dalam pembangunan.

Laporan keuangan perusahaan dihasilkan dan disiapkan sebagai pertanggungjawaban manajemen sehingga mencerminkan aktivitas perusahaan. Kewajiban tersebut tidak terbatas pada kepentingan manajemen tetapi juga untuk kepentingan otoritas pajak. Setiap perusahaan di Indonesia dalam membuat laporan keuangan diharuskan untuk mengikuti kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor dan kreditor. Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. Kebutuhan dalam Standar Akuntansi Keuangan tidak selamanya sejalan dengan ketentuan perpajakan. Sejumlah perbedaan antara PSAK dan aturan pajak menghasilkan dua jenis objek pajak yang berbeda, yaitu laba sebelum pajak (perhitungan laba akuntansi menurut PSAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan laba fiskal menurut aturan fiskal).

Adanya perbedaan antara pengukuran objek pajak menurut akuntansi dengan pengukuran objek pajak menurut undang-undang pajak memerlukan adanya adjustment atau penyesuaian terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat menurut aturan-aturan akuntansi seperti PSAK, dengan membuat laporan rekonsiliasi fisik terhadap laporan laba rugi menurut akuntansi. Pajak tangguhan merupakan jumlah

pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan waktu. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan, Waluyo (2014;277).

Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak menjadi salah satu instrumen bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dan akan merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam memanipulasi laba menjadi tinggi, Deviana (2010). Selisih laba komersial dan laba fiskal (*book-tax differences*) dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. Selisih tersebut dinamakan koreksi fiskal yang berupa koreksi negatif dan koreksi positif. Koreksi negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan menurut Djamaluddin (2008).

Selain sebagai warga negara, masyarakat juga sebagai insan yang beragama, selalu melaksanakan kewajibannya. Kewajiban harus dilakukan dengan benar (*shiddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), serta cerdas (*fathonah*). Shiddiq artinya benar yaitu tidak hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar. Tidak ada pertentangan antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Dalam hal pajak pihak manajemen harus melakukan dengan benar pembuatan laporan keuangan dan pelaporan pajak.

Amanah artinya dapat dipercaya adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Dalam hal pajak, laporan

keuangan yang telah dibuat oleh manajemen merupakan laporan keuangannya yang dapat dipercaya akan kebenaran di dalamnya. *Fathonah* artinya cerdas yaitu pandai menyesuaikan diri kaitannya ketika akan menyampaikan sesuatu. Dalam hal pajak, pihak manajemen harus cerdas dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti dalam penelitian yang berjudul ” **Analisis Pengaruh *Deferred Tax* (Pajak Tangguhan) Terhadap Laba dan Ditinjau dari Sudut Pandang Islam pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2013- 2016.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Deferred Tax* (Pajak Tangguhan) berpengaruh terhadap laba?
2. Bagaimana Pengaruh *Deferred Tax* (Pajak Tangguhan) terhadap laba ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh *Deferred Tax* (Pajak Tangguhan) terhadap laba pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh *Deferred Tax* (Pajak Tangguhan) terhadap laba pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tinjauannya dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi beberapa pihak terutama:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait analisis pajak tangguhan terhadap laba.

2. Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan pajak tangguhan serta dengan adanya karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan mencapai gelar sarjana dari program studi Akuntansi Strata 1 (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas YARSI.

3. Manajemen

Memberikan petunjuk bagi manajemen perlunya kemampuan manajemen mengelola perbedaan temporer sedemikian rupa sehingga laba akuntansi tetap dipersepsikan berkualitas atau direspon positif oleh investor.

4. Pengguna Laporan Keuangan

User dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas, handal dan dapat dipercaya sehingga informasi yang didapat tidak menyesatkan.